

2022



**PEMERINTAH KABUPATEN  
BANGKA**

**RENCANA KERJA**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN  
BANGKA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 21 ayat 3 menyebutkan bahwa : "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)".

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka dalam aspek perencanaan pembangunan daerah, yang memuat Kebijakan, Program-Program dan Kegiatan indikatif Inspektorat Kabupaten Bangka selama kurun waktu satu tahun sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat.

Tersusunnya Rencana Kerja ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang ada di Inspektorat Kabupaten Bangka, besar harapan kami agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kabupaten Bangka dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Sungailiat, 2 Agustus 2021

**INSPEKTUR,**



**DARIUS, S.Sos**

**NIP 19700617 199803 1 004**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	1
	1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	6
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka tahun lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Bangka .....	6
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bangka.....	14
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka.....	14
	2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	16
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	24
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	25
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Bangka.....	26
	3.3. Program dan Kegiatan .....	26
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
BAB V	PENUTUP.....	38

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022, dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023, Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Renja Inspektorat Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah :

- I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah



- Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
  25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
  26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 53);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 57);

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 Lingkup Inspektorat Kabupaten Bangka.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I           PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II           HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III          TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisitentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- BAB IV          RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**
- BAB V          PENUTUP**



## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan dan memanfaatkan data kinerja Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2020 Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Bangka sebesar Rp. 2.727.882.500,00 untuk pelaksanaan 6 (enam) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi keuangan sebesar Rp. 2.171.732.542,99,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 79,61%. Sementara itu pencapaian atas pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, dengan total anggaran sebesar Rp. 10.239.858.900,00 untuk pelaksanaan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya. Kejadian luar biasa pandemi covid-19 telah memberikan pengaruh nyata dalam pencapaian target kinerja Inspektorat tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Inspektorat 2019-2023. Beberapa target kinerja pada level sub kegiatan mengalami rasionalisasi sebagai dampak refocusing anggaran yang merupakan kebijakan nasional dalam upaya mengatasi dampak pandemi covid-19. Walaupun demikian, target kinerja Inspektorat secara umum diharapkan masih dapat dicapai sesuai perencanaan strategis melalui pendekatan pelaksanaan kegiatan secara non budgeting.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, capaian IKU Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2020 tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2020**

No	Indikator	Capaian 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2020 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Level Kapabilitas APiP	Level 3	Level 3	Level 3	100 %	Level 3	100,00
2.	Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB	88,24%	75%	94,12	125,49%	95,00	94,12
3.	Persentase OPD Yang Bebas dari Penyimpangan Yang Material	82,35%	80%	93,33%	116,67%	95,00	93,33
4.	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti	75,31%	80%	80,28%	100,34%	95,00	80,28
5.	Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00
6.	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	100%	Level 3	100,00

Secara umum capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Inspektorat 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Level Kapabilitas APiP mencapai 100,00 persen terhadap target akhir Renstra, Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB telah mencapai 94,12 persen dari target akhir Renstra, Persentase OPD Yang Bebas dari Penyimpangan Yang Material mencapai 93,33 persen dari target akhir Renstra, Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pengawasan yang selesai ditindaklanjuti mencapai 80,28 persen, Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan mencapai 40 persen dari target akhir Renstra dan Level Maturitas SPIP 100,00 persen dari target akhir renstra .

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)**  
**Kabupaten Bangka**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-1) (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun n-1) (2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Rencana PD tahun (n-2) (2019)	Realisasi Rencana PD tahun (n-2) (2019)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
4	Urusan Urusan Daerah								
4.06	Bidang Pengawasan Urusan								
4.06.17	Program Peningkatan Pengawasan Sistem Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	Level Kapabilitas APSP Persentase OPD yang nilai AKIP nya minimal Kategori BB Persentase OPD yang bebas dari penyempangan aset yang material Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material Persentase rekomendasi temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti Persentase Kasus/Pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan Level Mutu/layanan SPSP Jumlah dokumen LHP	Level 3 100%	Level 3 65%	Level 3 70%	Level 3 76,47%	Level 3 100%	Level 3 100%	Level 3 100%
4.06.17.01	Pengawasan Secara Berkala	Internal	Level 3 110 LHP	Level 3 76 LHP	Level 3 100%	Level 3 100 LHP	Level 3 100%	Level 3 100%	Level 3 100%



Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program [Rencana Peringkat Daerah] Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun (n-1) (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target Program dan Kegiatan (Rencana Peringkat tahun n-2) (2021)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
					Target Rencana tahun (n-2) (2020)	Realisasi Rencana PD tahun (n-2) (2020)				Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.06.17.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/pengawasan penyelesaian masyarakat	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	100%	100%	
4.06.17.06	Tindaklanjuti Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan APP dan BPK-RI	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.09	Satuan Tugas Sopo Bersih Pungutan Ular	Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pungutan liar	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.10	Unit Pengesajian Gratifikasi	Jumlah laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait gratifikasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.11	Review Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPO)	Jumlah laporan hasil review LKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.12	Review RKA SKPD	Jumlah laporan hasil review RKA OPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.14	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)	Jumlah OPD yang dievaluasi	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%	100%	
4.06.17.15	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah SPIP OPD yang dipantau	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	34 OPD	100%	100%	
4.06.17.22	Pemilihan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Review Rancangan Akhir RKP	Jumlah laporan PMPRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
4.06.17.23		Jumlah laporan hasil review rancangan akhir RKP	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	

Kode	Unitas/Bidang/Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Rencana PD tahun (n-2) (2020)	Realisasi Rencana PD tahun (n-2) (2020)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.06.17.24	Revisi Rancangan Akhir Renja	Jumlah laporan hasil revisi rancangan akhir renja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.25	Revisi Rancangan KUA dan PPAS	Jumlah laporan hasil revisi rancangan KUA dan PPAS	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.26	Survey Penelitian Integritas	Jumlah laporan survei integritas yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.30	Korsupgah KPK	Persentase Progres Capaian MCP (Monitoring Center For Prevention)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.21	Revisi LPPD	Jumlah Laporan Hasil Revisi sus LPPD Kabupaten Bangka	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.32	Revisi RPJMD	Jumlah laporan hasil revisi RPJMD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
4.06.17.33	Tim Koordinasi Pengawasan Pembangunan Daerah	Jumlah Advokasi hukum pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	100%	100%
Bidang Urusan Rumah Peringkat Daerah										
4.06.01	Program Pelayanan Administrasi Pertantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor Yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelaksanaan terdib. penatausahaan persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Uraian/Isiung Urusan/Pemrintach Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Bencana Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d. Kegiatan s/d. dengan tahun (n-3) (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Prograh dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)		Target program dan Kegiatan (Bencana PD tahun n-1) (2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target (n-2) (2020)	Realisasi (n-2) (2020)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
4.06.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
4.06.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>4.06.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>								
4.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia							
4.06.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara					1 Unit	1 Unit	100%
<b>4.01.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>								
4.01.03.05	Pengadaan Pakaran Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	16 Setel	16 Setel	16 Setel	16 Setel	16 Setel	-	0%



Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d kegiatan tahun (n-3) (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Rencana PD tahun n-1) (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah 5/4 tahun berjalan
					Target Renja PD tahun (n-2) (2020)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
4.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Non Formal								
4.01.05.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek dan Diklat Teknis	25 Org	17 Org	21 Org	21 Org	100%	100%	100%
4.01.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan								
4.01.06.01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SIPD	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	100%	100%
		Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	16 dok	16 dok	16 dok	16 dok	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	100%	100%

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2020 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

*a. Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran:*

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Pakaiian Khusus Hari-Hari Tertentu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Refocusing Anggaran.
2. Program Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Pameran Pembangunan Daerah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Refocusing Anggaran.
3. Pada Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:
  - Kegiatan Survey Penilaian Integritas tidak dapat dilaksanakan karena pihak BPS Kabuapten Bangka selaku pihak yang akan direncanakan untuk melakukan survey belum dapat melaksanakan kegiatan tersebut sehingga kemudian alokasi anggaran untuk kegiatan Survey Penilaian Integritas direfocusing dalam rangka penanganan Covid 19.
  - Kegiatan Reviu Rancangan Akhir Renja tidak dapat dilaksanakan karena pada saat akan dilaksanakan bertepatan dengan permintaan Reviu Dana Covid 19 dari beberapa OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan terkendala pada personil yang tidak mencukupi untuk melaksanakan reviu serta terkendala pada waktu pelaksanaan.

*b. Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran:*

Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

*c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan*

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Kapasitas aparatur Inspektorat yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional

tugas Inspektorat dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

#### 4. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bangka

Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai fungsi dan kewenangannya.

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar-Nas	DOK	Target Semester Tahun Ke-				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Level Kapabilitas APF	Tidak	Ya	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang tidak AEIPapa minimal tingkat VI	Tidak	Ya	70	75	100	100	100	100	100	100
3	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan anggaran	Tidak	Ya	75	80	85	90	100	100	100	100
4	Persentase Rekomendasi Timbul Hasil Pemantauan yang sesuai ditindaklanjuti	Tidak	Ya	75	80	85	90	100	100	100	100
5	Persentase Kasus/Pengaduan Masyarakat yang dapat diselesaikan	Tidak	Ya	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Level Mutuasi SPM	Tidak	Ya	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	100	100	100	100
<b>Indikator Review RENSTRA 2021-2023</b>											
1	Kapabilitas Pengawasan Internal APF (IACM)	Tidak	Ya	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	100	100	100	100
2	Tingkat Mutuasi SPM	Tidak	Ya	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	100	100	100	100

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Inspektorat telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Inspektorat yang baik.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

#### 1. Tingkat Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka. Inspektorat mempunyai



tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasannya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

## 3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat.

Tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka yaitu

- Pelaksanaan kebijakan strategis pemberantasan korupsi berdasarkan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan

Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- Tuntutan dalam mempertahankan Kapabilitas Pengawasan Intern APIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.
- Tuntutan dalam mempertahankan tingkat maturitas SPIP level 3 dan upaya meningkatkan ke level berikutnya.
- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh satuan unit kerja harus diselesaikan 60 hari setelah laporan diterima.
- Tuntutan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mempertahankan opini WTP;
- Tuntutan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi;
- Pengukuran kinerja secara terintegrasi merupakan bagian dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Tuntutan terhadap peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM APIP.
- Semakin meningkatnya anggaran yang dikelola desa sedangkan kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan belum memadai.
- Memaksimalkan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Inspektorat. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4  
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Revisi OPD  
 Inspektorat Kabupaten Bangla Tahun 2022

Rancangan Awal/Revisi OPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
6	UNSUB PENGUKUR GRUSAN PENERBITAHAN PENGAWASAN				28.848.548.394,00					12.000.500.210,00	
6.01	PROGRAM PENGUKUR GRUSAN PENERBITAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				34.191.850,00	PROGRAM PENGUKUR GRUSAN PENERBITAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				34.191.850,00	
			Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30				Nilai aspek pelaksanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	30		
			Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12,22				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	12,22		
2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.191.850,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				34.191.850,00	
			Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Perencanaan Kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
			Pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangla			28.612.150,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangla			28.612.150,00	
			Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 Dokumen				Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	1 Dokumen		



2.01.06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Gelasian Monev dan Kinerja Realisasi Kinerja SSPD	Kab. Bangk	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	5.275.730,00	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Gelasian Monev dan Kinerja Realisasi Kinerja SSPD	Kab. Bangk	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	5.275.730,00	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyelenggaraan Laporan Gelasian Monev dan Kinerja Realisasi Kinerja SSPD	Kab. Bangk	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Dokumen	5.275.730,00
			0%	0%				0%	0%				0%	0%	
2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	7.720.962.900,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	7.720.962.900,00			100%	100%	7.720.962.900,00
2.02.01	Sub Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangk	Jumlah laporan kinerja yang disusun	12 Bulan	7.720.962.900,00	Sub Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangk	Jumlah laporan kinerja yang disusun	12 Bulan	7.720.962.900,00			14 Laporan	14	7.720.962.900,00
			70	70				70	70				70	70	
2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40%	40%	354.602.500,00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40%	40%	354.602.500,00			100%	100%	354.602.500,00
			100%	100%				100%	100%				100%	100%	

2.03.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beretta Akibat Kelengkapannya	Kab. Bangk	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	45 Paket	20.791.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beretta Akibat Kelengkapannya	Kab. Bangk	Jumlah paket pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	45 Paket	20.791.000,00
2.05.00	Sub Kegiatan Pembelian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangk	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sub jabatan sub formal	14 Orang	430.871,750,00	Sub Kegiatan Pembelian dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bangk	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan non formal	14 Orang	430.871,750,00
2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	155.127.000,00
2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangk	Jumlah rapat Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terbagian	12 Bulan	165.127.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangk	Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah yang terbagian	12 Bulan	165.127.000,00
2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	167.791.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Mula Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Perentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	167.791.000,00
2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangk	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadukan	1 Paket	167.791.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangk	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadukan	1 Paket	167.791.000,00

		Jumlah perhitungan poding kantor yang diadakan	1 Paket			Jumlah perhitungan poding kantor yang diadakan	1 Paket			
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>			<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>2</b>			
2.01	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	248.272.000,00	100%	Kegiatan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	248.272.000,00	100%	
			3 Layanan	3 Layanan						
2.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangla	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Surat Menyurat	200.922.000,00	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Surat Menyurat	200.922.000,00	12 Bulan	
2.01.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kebutuhan Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangla	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kebutuhan Daya Air dan Listrik	156.947.000,00	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kebutuhan Daya Air dan Listrik	156.947.000,00	12 Bulan	
			Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani	Jumlah layanan penyediaan internet yang tertangani						
			Jumlah layanan update/pengaduan masyarakat yang tertangani	Jumlah layanan update/pengaduan masyarakat yang tertangani						
2.01.04	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kantor	Kab. Bangla	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kantor	156.947.000,00	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kantor	156.947.000,00	12 Bulan	
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>			<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>			



2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	227.018.200,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peningjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	227.018.200,00
2.09.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pertaxasi Kendarasan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bangha	4 unit Kendarasan (Kabs Dus, 3 Unit Kendarasan (Bodi Dus	184.472.500,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan dan Moan Lainnya	Kab. Bangha	4 unit Kendarasan (Kabs Dus, 3 Unit Kendarasan (Bodi Dus	184.472.500,00
2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perawatan dan Moan Lainnya	Kab. Bangha	3 Pabri	38.276.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perawatan dan Moan Lainnya	Kab. Bangha	3 Pabri	38.276.000,00
2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Binaan Lainnya	Kab. Bangha	1 Unit	45.112.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Binaan Lainnya	Kab. Bangha	1 Unit	45.112.000,00
2.09.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan Peningjang Urusan Pemerintahan			906.060.000,00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Peningjang Urusan Pemerintahan			906.060.000,00
	Level Efisiensi Peran dan Layanan APSP		Level 3		Level Efisiensi Peran dan Layanan APSP		Level 3	
	Perawatan GPD Dengan Presibot WDR		50,07		Perawatan GPD Dengan Presibot WDR		50,07	
	Level Efisiensi Peningkatan SMM		Level 2		Level Efisiensi Peningkatan SMM		Level 3	
2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Internal	Singailiat	100%	801.645.400	Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan dan Peningkatan	Singailiat	100%	801.645.400
	Perbaikan Perawatan jumlah kegiatan yang mandiri		85%		Perawatan Perawatan jumlah kegiatan yang mandiri		80%	
	Jumlah rekamrevisi perbaikan 2E Program yang		100%		Jumlah rekamrevisi perbaikan 2E Program yang		100%	







## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 18 ayat (2) Inspektorat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan meliputi :

- a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan ;
- b. Pemeriksaan secara berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari Pemerintah Daerah;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

*Sedangkan program kegiatan yang terkait dengan masyarakat telah diakomodasi melalui kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah. Terkait dengan uraian diatas serta berorientasi pada isu-isu penting diantaranya penanganan pengaduan masyarakat yang belum optimal, disebabkan keterbatasan sumber daya aparatur yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pengawasan.*

**BAH III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Yelnaan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah Kabupaten Bangka, maka berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2022 dan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022 dan dapat dilihat pada tabel Hubungan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah dibawah ini :

No	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah
1.	Ekonomi	
2.	Lingkungan	
3.	Politik	
4.	Hukum	
5.	Pertahanan dan Keamanan	
6.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan : - Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. - Meningkatnya penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik
7.	Kesejahteraan Rakyat	
8.	Kewilayahan	
9.	Kelautan	

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka maka Prioritas Nasional yang berkaitan langsung adalah pada **Prioritas ke-6 yaitu Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.**

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Inspektorat

Dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan

Tujuan yang diformulasikan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka adalah mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif.

#### 2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Inspektorat Kabupaten Bangka adalah Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2022, Program dan Kegiatan tahun 2022 disusun berdasarkan :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2019-2023;
- b. RKPD Kabupaten Bangka 2022;
- c. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Usulan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka telah dituangkan dalam tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 sebagaimana dijelaskan pada bab III diatas. Dari tiap-tiap program/ kegiatan/ Sub kegiatan dan indikator program/ kegiatan/ Sub kegiatan beserta outputnya dengan kebutuhan anggaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga gambaran



program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)
		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
<b>A.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>8.083.100.100</b>
	<b>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>21.083.500</b>
	1.1. Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	APBD	16.011.000
	1.2. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	13 Laporan	APBD	5.072.500
	<b>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.949.828.100</b>
	2.1. Sub. Kegiatan Penyerahan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tertangani	12 bulan	APBD	6.949.828.100
	<b>3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>168.792.500</b>
	3.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	43 Stel	APBD	-
		Jumlah pakaian olahraga yang tersedia	16 Stel		
	3.2. Sub. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan, bimbingan dan sertifikasi teknis	35 orang	APBD	168.792.500
	<b>4. Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah</b>				<b>150.110.000</b>
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tertangani	12 bulan	APBD	150.110.000
	<b>5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>52.510.000</b>
	5.1. Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	24 Unit	APBD	52.510.000

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)
		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
	<b>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>524.576.200</b>
	6.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Burial Masyarakat	Jumlah layanan jasa pemusatan yang tertangani	12 bulan	APBD	200.856.100
	6.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Kemitrahan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunitas, sumberdaya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	APBD	187.510.000
	6.3. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	APBD	166.200.000
	<b>7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>216.199.800</b>
	7.1. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang tertangani	12 bulan	APBD	140.429.800
	7.2. Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	APBD	34.760.000
	7.3. Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Danganan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Unit	APBD	41.010.000
<b>8</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>				<b>784.504.000</b>
	<b>1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>				
	1.1. Sub. Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	Jumlah LHP	8 LHP	APBD	45.742.000
	1.2. Sub. Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan	6 Laporan	APBD	196.237.000
	1.3. Sub. Kegiatan Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan	3 Laporan	APBD	31.540.000
	1.4. Sub. Kegiatan Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan	1 Laporan	APBD	22.840.000
	1.5. Sub. Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah LHP Desa	25 Desa	APBD	125.945.000
	1.6. Sub. Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan	2 Laporan	APBD	269.700.000
	1.7. Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Laporan	2 Laporan	APBD	62.500.000

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	KELUARAN		SUMBER DANA	PAGU ANGGARAN (Rp)
		TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		
C	<b>2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>				<b>94.935.000</b>
	2.1. Sub Kegiatan Pemegangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	APBD	74.010.000
	2.2. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Kasus	15 LHP	APBD	20.925.000
	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>				<b>281.115.000</b>
	<b>1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi</b>				
	1.1. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang diaasistensi dilakukan pendampingan	34 OPD	APBD	29.910.000
	1.2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Refleksi Birokrasi	Jumlah OPD yang didampingi dalam PMPRB	34 OPD	APBD	20.810.000
	1.3. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan	1 Laporan	APBD	15.285.000
	1.4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pelaksanaan Integritas	Jumlah Laporan	1 Laporan	APBD	215.110.000



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat Daerah berisi rumusan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif disajikan dalam tabel.

Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Bangka.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN MAJU TAHUN 2023  
KABUPATEN BANGKA

OPD : INSPEKTORAT

Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Problema Mengu Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Page Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana page Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	URUSAN PEGAWAIAN URUSAN PEKERJAAN				11.974.227.040,00				12.031.650.294,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.02	PROGRAM PENGALIHAN PEKERJAAN				906.000.000,00				906.075.790,00
				Level 3				Level 3	906.075.790,00
				3.3.3	906.000.000,00			MAAF	
				Level 3				Level 3	
6.01.02.3.01	Kegiatan Penyusunan Penganggaran Internal	Persentase Penurunan Jumlah Karyawan yang mutasi	Kab. Bangka	85%	881.000.000,00	APBD	PI	85%	881.000.440,00
		Jumlah rekrutmen perbelanjaan di Program yang ditindaklanjuti		100%				100%	
		Persentase rekrutmen hasil pengumuman internal yang ditindaklanjuti		100%				100%	

Kode	Drajan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Problematika Mekanisme Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase APPP bersertifikasi positif, tabung dan penjurangan	Kab. Bangkaja	100%				100%	
		Asumsi: pelaksanaan administrasi dan reformulasi penyediaan atau hasil audit pada CAPD		1 Disember	50.316.200,00	APBD	P1	1 Disember	50.316.200,00
		Jumlah hasil RP2D		2 Disember				2 Disember	
		Jumlah Jarak Kerja		1 Disember				1 Disember	
		Jumlah Hasil RP2MD		1 Disember				1 Disember	
6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dokumen Keuangan	Sunggai	2 Laporan	215.840.700,00	APBD	P1	2 Laporan	215.840.700,00
6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Hasil Laporan Kinerja	Jumlah Hasil Laporan Kinerja	Sunggai	3 Laporan	34.894.000,00	APBD	P1	3 Laporan	34.894.000,00
6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Hasil Laporan Keuangan	Jumlah Hasil Laporan Keuangan	Sunggai	2 Laporan	25.124.000,00	APBD	P1	2 Laporan	25.124.000,00
6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Dana	Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan Dana	Sunggai	37 LAP	130.519.500,00	APBD		37 LAP	130.519.500,00
6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kegiatan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal	Sunggai	2 Laporan	211.076.300,00	APBD		2 Laporan	211.076.300,00
6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Laju/ Hasil Pelaksanaan RPT dan Pelaksanaan Laporan Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Terbitnya Hasil pemeriksaan RPT dan Pelaksanaan RPT dan Pelaksanaan APSP	Sunggai	3 Laporan	82.210.000,00	APBD		3 Laporan	82.210.000,00
6.01.02.2.01	Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan Desain Tahun Tertentu	Persentase penyelesaian pelaksanaan kegiatan daerah/ungas	Sunggai	80%	104.420.300,00	APBD	P1	80%	104.420.300,00



Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	3	4	100%		100%		Catatan Penting	100%	
				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lebuah	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Indikatif
6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Desa	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Dengan Tindakan Terpadu	Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Berkas	2 Laporan	01.411.000,00	APRO	PI	2 Laporan	01.02.100,00	
6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Dengan Tindakan Terpadu	LAP/Kertas	Berkas	16 LAP	23.017.000,00	APRO	PI	15 LAP	23.319.250,00	
6.01.02	<b>PROGRAM PERUBAHAN BERBAHAR, PERDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			100%	308.226.300,00			100%	308.226.300,00	
6.01.02.3.01	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang membangun kegiatan pendampingan melalui	Program	MASI	308.226.300,00	APRO	PI	01,77	340.149.100,00	
6.01.02.3.01.01	Sub Kegiatan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD memiliki eselonasi dan anggaran ERP	Berkas	34 OPD	32.901.000,00	APRO	PI	34 OPD	36.191.100,00	
6.01.02.3.01.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang diinstruksikan dan dibantu pendampingan	Berkas	34 OPD	22.891.000,00	APRO	PI	34 OPD	23.000.000,00	
6.01.02.3.01.03	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Laporan Monev Berkas dan Pendampingan	Berkas	1 Laporan	16.013.300,00	APRO	PI	1 Laporan	16.013.300,00	
6.01.02.3.01.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	Jumlah Laporan Pendampingan	Berkas	1 Laporan	336.021.000,00	APRO	PI	1 Laporan	360.000.000,00	

6.01	PROGRAM PERUBAHAN URUTAN PEMERINTAH DAERAH	10.238.393.142.86	11.204.613.154.061	Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023			
				TARGET CAPAIAN KINERJA	KELOMPOK DATA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KELOMPOK DATA		
1.	Evisuasi/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah RHSI aspek pelaksanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kinerja yang diukur sesuai standar Persentase pelaksanaan kinerja yang diukur sesuai standar	30 32,22 100% 100%	59.855.600,00 100%	APBD PI	63.663.160,00 100%	30 32,22 100% 100%	9 100%	Relevansi dan MGR Indikator
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Pengukuran Pelaksanaan Pemerintahan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	3 Dokumen	26.612.000,00	PI	31.473.10,00	3 Dokumen	31.473.10,00	3 Dokumen
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengaturan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kegiatan Kinerja SOPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	7 Dokumen	31.000.000,00	PI	34.191.850,00	7 Dokumen	34.191.850,00	7 Dokumen
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tuntaskan Penyelesaian Keuangan OPD dan LHP-BPK RI Persentase Pelaporan Keuangan yang diukur sesuai standar	0% 100%	0.497.059.190,00 0.497.079.190,00		0.542.365.109,00 0.542.365.109,00	0% 100%	0.542.365.109,00 0.542.365.109,00	0% 100%
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Cai dan Tunjangan ASN	Jumlah anggaran pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertuang	12 Bulan	6.643.818.190,00	PI	6.342.063.200,00	12 Bulan	6.342.063.200,00	12 Bulan
		Indeks Profesionalisme Aparatur		73		73		73	429.049.075,00

Kode	Uraian/Hidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/R kegiatan	Indikator Kinerja Program/R kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.3.00	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	Sebagian	80%	340.042.710,00	APBD	PT	85%	429.049.022,00
		Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu		80%				85%	
		Persentase aparatur yang melaksanakan baik		80%				85%	
6.01.01.3.00.02	Dukungan Kegiatan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penerima Dinas Korman	Sempurna	40 orang	20.381.000,00	APBD	PT	40 orang	43.332.100,00
		Jumlah Penerima Olahraga	Sempurna	10 orang				16 orang	
6.01.01.3.00.05	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. Mendukung Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan inside, penunjang dan diklat rekrut		35 orang	333.671.950,00	APBD	PT	35 orang	367.780.920,00
		Jumlah Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		2	310.000.000,00			2	385.000.000,00
6.01.01.3.00	Kegiatan Administrasi Umum	Indeks Iklim dan Prosesnya Aparatur		83				88	
		Persentase Arah Perangkit Daerah yang dihabiskan sesuai peraturan	Sempurna	100%	350.000.000,00	APBD	PT	100%	385.000.000,00
6.01.01.3.00.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Tingkat SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tersusun		12 bulan	100.000.000,00			12 bulan	100.000.000,00
		Jumlah laporan dan Perencanaan Monev dan Situasi yang tersusun		12 bulan				12 bulan	



Kode	Uraian/ Bidang Urusan/ Fungsional Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Masa-masa Tahun 2022			Outstan Penting	Misi Kemasssa Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keburukan dana pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lemari	Perencanaan Pemilihan barang dan Pemasangan Pembekuan barang Pemerintah Daerah Sumbah Perumahan Kantor Tang tersebut Fasilitas Injeksi Suarane AC Filling Kabinet Laptop	4	3 juta 1 juta 1 juta 3 juta 8 juta 4 juta	187.761.000,00 147.781.000,00	7 4PMD	8	9 juta 1 juta 1 juta 5 juta 8 juta 9 juta	184.537.100,00 184.537.100,00
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan Aduy Pengadaan Daerah yang ditunjuk sesuai peraturan Daerah Daerah yang ditugaskan berdasarkan Perencanaan APBD dalam bentuk Buku Perencanaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah		100% 75% 85% 100%	540.533.800,00	100% 75% 85% 100%		100% 75% 85% 100%	636.385.200,00
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Berat Mengantar	Jumlah kegiatan jasa transportasi yang terdapat	Sungailiat	12 Bulan	205.900.800,00	4PMD	PI	12 Bulan	243.948.700,00
6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumbat Dapur Air dan Listrik	Jumlah kegiatan jasa Konstruksi, Sumbat Dapur Air dan Listrik yang terdapat	Sungailiat	12 Bulan	156.782.600,00	4PMD	PI	12 Bulan	159.427.000,00

Kode	Uraian/Ridang Urusan Penyelenggara Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Menzais Tahun 2022			Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana pagu Indikatif
				5	6	7	8	10
6.01.01.2.09.04	Sub Kegiatan Penghinaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan jasa service pelanggan dari peningkatan jumlah yang bertanggung	Sianggabit	12 Bulan	10.420.000,00	A/RPD	12 Bulan	201.102.000,00
6.01.01.3.09	Kegiatan Pemeliharaan Ruang Milik Daerah Pemrograman Daerah	Persentase D/ED (dikawatir) selesai		100%	237.019.760,00		100%	281.099.738,00
6.01.01.3.09.02	Sub Kegiatan Penghinaan Jasa Pemeliharaan, Ruang Pemeliharaan, Ruang dan Perbaikan Pemeliharaan Daerah Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kerasukan Desa/Operasional yang bertanggung	Sianggabit	12 Bulan	135.472.700,00	A/RPD	12 Bulan	149.220.058,00
6.01.01.3.09.03	Sub Kegiatan Penghinaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah layanan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor yang bertanggung	Sianggabit	12 Bulan	30.210.000,00	A/RPD	12 Bulan	42.052.000,00
6.01.01.3.09.04	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Rangsangan Lainnya	Jumlah layanan Jasa Perawatan dan Perbaikan yang bertanggung	Sianggabit	12 Bulan	45.111.000,00	A/RPD	12 Bulan	49.622.000,00

## BAB V PENUTUP

Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2022 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai pendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahunan Tahun 2022.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Renja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 serta untuk mewujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, seluruh aparatur Inspektorat secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022.
3. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.





**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR : 188.4 / 64 / INSPEKTORAT/2020**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**INSPEKTUR KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka, maka perlu adanya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka, dengan Keputusan Inspektur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, yaitu :

1. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja.
2. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja sesuai tahapan dan tatacara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah;
3. melakukan revisi/perbaiki rencana kerja sesuai ketentuan; melaporkan hasilnya kepada kepala perangkat daerah.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Pada Tanggal : 2 Desember 2020

**INSPEKTUR,**



**DARIUS**